

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Bantuan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi dimungkinkan melalui investasi yakni dengan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain penanaman modal, belanja modal juga mempengaruhi output suatu daerah. Belanja modal ialah bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk pengeluaran barang dan jasa yang dapat menambah kekayaan atau kekayaan tetap daerah yang manfaatnya lebih dari satu periode anggaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari segi ekonomi dengan pendapatan wilayah atau PDRB perkapita yang diterima. PDRB adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk disuatu daerah pada tahun tertentu sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.1 di bawah ini menjelaskan perkembangan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat :

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020
(Jutaan Rupiah)

Kab/Kota	PDRB Menurut Harga Konstan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	11.813.974,13	12.411.928,95	13.023.675,16	13.643.137,73	13.367.321,04
Bengkayang	4.889.159,76	5.163.899,18	5.434.858,36	5.714.396,52	5.600.474,14
Landak	6.067.561,36	6.381.212,22	6.694.979,23	7.022.179,06	6.975.267,37
Mempawah	4.425.719,60	4.685.371,26	4.955.360,48	5.241.754,13	5.251.537,46
Sanggau	11.636.867,84	12.157.876,57	12.670.003,80	13.163.333,50	13.255.682,66
Ketapang	14.607.934,98	15.661.142,01	16.887.779,26	18.022.027,56	17.932.651,06
Sekadau	3.363.659,73	3.848.258,07	4.072.437,48	4.294.373,82	4.252.448,46
Melawi	2.942.746,29	3.081.202,07	3.242.894,14	3.389.914,94	3.352.524,41
Kubu Raya	15.416.533,31	16.424.299,12	17.287.111,07	18.275.888,73	17.832.608,95
Kota Pontianak	21.801.143,39	22.881.967,08	23.846.673,62	24.833.239,27	23.847.214,46
Kalimantan Barat	96.967.316	102.699.173,53	108.117.791	113.602.264	111.669.750

Sumber : BPS Kalimantan Barat

Tabel 1.1 dapat dilihat pada periode 2016-2020 PDRB di Provinsi Kalimantan Barat yang tertinggi ialah Kota Pontianak, yang mana PDRB di tahun 2019 sebesar 24.833.239,27 juta rupiah sementara yang terendah yaitu Kabupaten Melawi yang mana PDRB di tahun 2016 sebesar 2.942.746,29 juta rupiah. PDRB tertinggi kedua setelah Kota Pontianak yaitu PDRB Kabupaten Kubu Raya yang memiliki PDRB di tahun 2019 sebanyak 18.275.888,73 juta rupiah. Kota Pontianak merupakan kota penyumbang terbesar PDRB di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Melawi penyumbang PDRB terkecil di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu diketahui faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah investasi. Pemerintah daerah harus membentuk kebijakan yang mendukung investasi yang dapat menguntungkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Peran swasta dapat terlihat dari nilai yang dilakukan swasta melalui tambahan investasi yang ditanamkan di

berbagai sektor yang membuat perekonomian tumbuh dan berkembang dengan indikator. Dengan adanya pertumbuhan investasi diharapkan dapat mempromosikan pengembangan investasi yang saling menguntungkan dalam proses pembangunan daerah. Berikut data realisasi penanaman modal asing di Kalimantan Barat :

Tabel 1.2
Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020
(Jutaan Rupiah)

Kab/Kota	Realisasi PMA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	379.898,92	413.396	23.756.860	216.568.500	134.625.000
Bengkayang	131.346,04	186.219	290.486.540	1.988.925.000	1.612.075.500
Landak	429.952,25	501,65	224.837.260	81.622.500	124.215.000
Mempawah	197.204,69	204.074	323.865.940	53.251.500	2.249.997.000
Sanggau	1.145.294,41	1.244.033	184.003.440	822.612.000	935.622.000
Ketapang	2.063.059,49	2.270.624	5.029.779.780	4.552.810.500	4.525.984.500
Sekadau	320.282,92	320.313	21.364.960	75,000	81.238.500
Melawi	148.580,34	166.787	3.749.320	3.612.000	286.998.000
Kubu Raya	469.559,24	472.076	44.178.460	512.220.000	1.133.050.500
Kota Pontianak	130.224,85	144.113	388.411.060	133.342.500	22.176.000
Kalimantan Barat	5.417.419,15	5.424.153,65	6.534.435.638,00	8.364.966.594,00	11.105.984.020,00

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Pada tabel 1.2 dapat dilihat Penanaman Modal Asing di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang berfluktuatif. Penerima PMA tertinggi pada tahun 2016-2020 adalah Kabupaten Ketapang yakni pada tahun 2018 sebesar 5.029.770.780 juta rupiah dan Penerima PMA terendah di Kalimantan Barat pada tahun 2016-2020 adalah Kabupaten Sekadau yakni pada tahun 2019 sebesar 75.000 juta rupiah. Data pada penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2016- 2020 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya atau berfluktuasi. Investasi asing sangat berperan dalam membantu dalam aktivitas ekonomi yang terkadang lesu akibat kurangnya modal dari entitas asing maupun dari dalam negeri itu sendiri sehingga perlu bantuan dari pihak luar agar dapat melangsungkan pelaksanaan ekonomi yang sempat terhambat. Selain itu investasi asing menciptakan perusahaan baru dan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah serta menambah devisa negara. Dengan adanya perusahaan baru tersebut lapangan pekerjaan akan terbuka dan dapat menambah pengetahuan tentang teknologi baru sehingga sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan investasi dan menerima manfaat bantuan investasi yang datang dari luar negeri dalam membantu perekonomian daerah tersebut. Ini membuktikan bahwa Kalimantan Barat banyak mendapatkan bantuan investasi dari luar dalam membantu perekonomian di Kalimantan Barat. Berikut data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Barat Pada Tahun 2016-2020:

Tabel 1.3
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 – 2020 (Jutaan Rupiah)

Kab/Kota	Realsasi PMDN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	928.783,22	1.154.040,52	355.494,30	400.474,20	339.415,30
Bengkayang	4.512.610,35	4.512.610,35	135.866,00	316.712,70	913.795,90
Landak	2.008.474,94	4.703.678,04	1.189.330,80	176.210,20	127.760,90
Mempawah	3.690.495,10	5.982.129,20	352.009,60	378.526,90	4.476.489,00
Sanggau	4.485.119,82	7.481.135,82	602.454	947.710,10	323.451,70
Ketapang	6.502.894,94	7.297.008,94	693.985,80	711.942,90	833.103,90
Sekadau	1.392.147,36	1.732.644,26	798.986,00	556.382,50	207.711,30
Melawi	2.559,28	61.672,88	29.687,90	575.601,40	45.156,30
Kubu Raya	3.096.428,99	4.302.965,39	983.441,90	743.640,80	451.569,80
Kota Pontianak	455.630,69	512.766,39	278.660,90	51.293,60	161.937,10
Kalimantan Barat	27.077.160,69	37.742.668,79	5.421.935,20	4.860.514,30	7.882.411,20

Sumber : BPS Kalimantan Barat

Pada tabel 1.3 dapat dilihat realiasasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kalimantan Barat selama tahun 2016-2017 meningkat namun mencatat penurunan yang signifikan di tahun 2018. Penerima Penanaman Modal Dalam Negeri tertinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan rata-rata penerimaan Penanaman Modal Dalam Negerinya sebesar 3.207.787,80 juta rupiah dan Penerima Penanaman Modal Dalam Negeri terendah yakni Kota Melawi dengan rata-rata yaitu 142.935,55 juta rupiah. Keberhasilan meningkatkan daya tarik investasi tergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan sebagai langkah awal kebijakan untuk memperbaiki kondisi pemerintah harus memiliki indikator-indikator yang dapat digunakan secara berkala untuk memantau investasi di Kalimantan Barat. Belanja modal juga salah satu cara untuk mencapai tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan social. Oleh karena itu, investasi sangat penting karena berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pada tabel berikut akan diperlihatkan belanja modal Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1.4
Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Kab/Kota	Realisasi Belanja Modal				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Sambas	353.843,67	307.386,29	269.024,40	318.909,88	237.715,45
Kab. Bengkayang	302.507,97	236.689,31	331.382,56	249.957,81	121.349,99
Kab. Landak	454.308,01	322.568,31	247.612,03	209.342,45	256.463,27
Kab. Mempawah	323.806,71	211.598,48	137.847,24	153.240,37	158.689,81
Kab. Sanggau	411.705,13	343.624,27	321.211,99	324.067,46	189.870,98
Kab. Ketapang	382.240,54	444.444,06	540.124,77	670.237,62	424.576,87
Kab. Sekadau	282.453,21	256.696,93	262.023,25	180.105,85	216.904,42
Kab. Melawi	386.483,04	414.316,59	272.142,46	284.809,07	155.470,13
Kab. Kubu Raya	423.562,15	290.544,78	308.891,45	226.817,47	140.383,57
Kota Pontianak	443.896,32	421.461,44	513.934,89	435.824,13	423.849,90
Kalimantan Barat	3.766.822,75	3.251.347,46	3.206.213,04	3.055.331,11	2.327.294,39

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada tabel 1.4 dapat dilihat belanja modal di Kalimantan Barat meningkat dan menurun setiap tahun (berfluktuasi). Belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan rata-rata belanja modal 492.324,77 juta rupiah dan belanja modal tertinggi kedua yaitu Kota Pontianak dengan rata-rata belanja modal 447.793,34 juta rupiah. Penerimaan belanja modal juga merupakan strategi alokasi belanja daerah yang memegang peranan penting dalam daerah. Untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah, alokasi belanja modal perlu ditingkatkan lagi. Karena Belanja Modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mencakup pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sehingga masyarakat juga memperoleh manfaat dari pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PMA terhadap PDRB di Kalimantan Barat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh PMDN terhadap PDRB di Kalimantan Barat, untuk menguji dan menganalisis BM terhadap PDRB di Kalimantan Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan ide bagi pemerintah daerah khususnya dalam memberikan berbagai insentif pada investasi swasta agar lebih berperan besar guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan mengalokasikan anggarannya, khususnya belanja modal sehingga dapat memberikan pengaruh optimal pada perbaikan kesejahteraan.

2. Kajian Literatur

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membantu kehidupan bermasyarakat di suatu daerah meningkat dibanding sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator makro dan kriteria keberhasilan pembangunan serta membantu untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan. Semakin besar pembangunan ekonomi, semakin besar kesejahteraan seluruh masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dimana pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Teori yang mendukung model pertumbuhan Harrod-Dommar. Model ini menggambarkan hubungan ekonomi fungsional dimana tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (g) secara langsung bergantung pada tingkat tabungan negara (s) dan berbanding terbalik dengan tingkat produksi modal negara (c).

Bariyah (2015) juga berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam proses ekonomi, termasuk peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dan penguatan masyarakat, menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik. Laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai suatu negara tergantung pada tingkat perkembangan teknologi, peran modal, dan peran tenaga kerja dalam menghasilkan pendapatan negara. Simon Kuznets (Arsyad, 1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi memiliki tiga faktor kunci yang sangat penting yaitu :

1. Peningkatan berkelanjutan dalam output nasional merupakan wujud dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk memasok berbagai barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.